

**UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM)
DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH****Deddy Romanza¹, Alfian², Bobby Rahman³**^{1,2,3} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh Indonesia
E-mail Korespondensi: alfian@unimal.ac.id

ABSTRAK

Pasca penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005 di Helsinki, provinsi Aceh menjadi rawan terhadap pergesekan konflik bersenjata. KPA yang merupakan lembaga transformasi GAM menjadi ujung tombak penting dalam menjaga perdamaian, pergeseran konflik berubah arah menjadi konflik sesama mantan Gerakan Aceh Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KPA wilayah Kuta Pasee dalam menjaga perdamaian di Aceh. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan konflik dan pembangunan perdamaian. Data dalam penelitian ini berupa pelucutan senjata dan pembangunan perdamaian, data penelitian ini bersumber dari beberapa informan, yaitu narasumber di lapangan yang sudah ditentukan secara purposif, kondisi yang terjadi di lapangan, dokumen serta literatur yang terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu daftar pertanyaan dan daftar pengamatan. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif yaitu dilakukan dengan kajian analisis resolusi konflik dan *peacebuilding*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPA merupakan lembaga yang dimana setelah perdamaian berlangsung menjadi ujung tombak dalam menjaga perdamaian di Aceh. Meskipun dalam menjaga perdamaian di Aceh KPA terdapat banyak masyarakat yang meragukan kinerja KPA, dan untuk mewujudkan kemakmuran dan keharmonisan di Aceh maka kerjasama antara lembaga daerah yang ada di Aceh harus terjalin sebaik-baiknya.

Kata Kunci:*Eks Kombat, GAM, KPA, Peacebuilding, ACEH*

A. PENDAHULUAN

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung Barat Indonesia, Aceh merupakan provinsi yang sudah dari dulu melawan penjajahan. Namun di era Orde Baru sampai reformasi Aceh lagi-lagi dilanda oleh

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

konflik bersenjata. Yang menjadi aktor dibalik terjadinya konflik itu antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berlangsung dalam jangka waktu 30 tahun dan konflik berakhir ketika Aceh dilanda oleh musibah Stunami yang melanda bumi serambi Mekkah di penghujung tahun 2004.

Desember 2004 merupakan momen yang tidak terlupakan bagi masyarakat Aceh, ketika gempa dan Tsunami meluluh lantakkan daratan Aceh dan membungkam konflik berkepanjangan di Aceh. Menyebutkan bahwa Tsunami menjadi pintu bagi penyelesaian konflik Aceh melalui perdamaian, terutama setelah pemerintah mengumumkan bahwa rehabilitasi dapat dilaksanakan jika keamanan di Aceh terjamin. GAM dan pemerintah Republik Indonesia kemudian sepakat untuk mengadakan pertemuan dan membahas tentang perdamaian Aceh (Ikramatoun dan Amin, 2018).

Pasca perdamaian menggema di Aceh, Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) disahkan, pihak Aceh Monitoring Mission (AMM) yang bertugas mengawasi implementasi MoU mengambil beberapa langkah untuk proses rekonsiliasi dan reintegrasi, dibentuklah badan khusus untuk menaungi proses reintegrasi mantan anggota GAM, yaitu Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Dengan undang-undang yang telah dibentuk tentang kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan, proses rekonsiliasi dan rehabilitasi selanjutnya tidak hanya meleburkan mantan anggota GAM ke dalam kehidupan masyarakat Aceh, namun juga mentransformasi gerakan perjuangan dan mengantar GAM ke dalam panggung politik.

Sebagai langkah awal proses rekonsiliasi pasca MoU, Aceh Monitoring Mission (AMM) meminta GAM untuk membubarkan struktur keorganisasiannya agar menghilangkan kesan separatisme dari mantan anggota GAM. GAM kemudian membubarkan struktur organisasinya, dan mengubahnya menjadi Komite

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

Peralihan Aceh (KPA). KPA pada awalnya dibentuk untuk menjaga kendali dan sebagai sumber atau data informasi tentang mantan simpatisan GAM. Namun dalam perkembangannya, organisasi ini justru menjadi organisasi yang eksklusif dan elitis, tertutup bagi kelompok di luar mantan simpatisan GAM. Akibatnya dalam proses rekonsiliasi, KPA tidak hanya mengalihkan GAM dari gerakan bersenjata menjadi gerakan sipil, namun dengan berbagai kekhususan yang tercantum dalam MoU, KPA ini juga seolah-olah berubah menjadi gerakan politik (Basyar, ed. 2008).

Disebutkan bahwa KPA tidak boleh menjadi gerakan politik, supaya KPA betul-betul yakin dan konsisten dalam menjaga perdamaian di Aceh, dikarenakan apa bila KPA sudah menjadi gerakan politik maka perdamaian akan terusik kembali. Dan secara struktural, tidak ada perubahan yang cukup signifikan dalam susunan kepengurusan GAM dan KPA. Langkah ini dianggap praktis dan taktis untuk memudahkan konsolidasi dalam proses reintegrasi. Tugas KPA dimulai dari pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi mantan pejuang hingga berfungsi pula sebagai basis bagi organisasi dan diskusi politik. Para pemimpin GAM juga lega karena tetap menduduki posisi seperti semula, misalnya seperti panglima GAM yang beroperasi di tingkat lokal, dalam struktur KPA, ia menjabat sebagai kepala kantor KPA wilayah (Tornquist, ed, 2011). Hal ini yang menjadi satu-satunya cara agar perdamaian akan abadi di Aceh dikarenakan para petinggi GAM yang dulu dalam berperangan mendapatkan kedudukan tinggi sebagai panglima dan setelah perdamaian mereka akan kembali mendapatkan kedudukan sebagai panglima dalam setiap wilayah atau yang lebih dikenal dengan panglima wilayah.

Tabel 1 Daftar nama KPA di Wilayah Aceh

NO	NAMA	WILAYAH	KETERANGAN
1	Syarbani	ACEH SINGKIL	

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

2	Ucil	KUTACANE	
3	Amiruddin	GAYO LUES	
4	Sufrida	SUBULUSSALAM	
5	Alfa Bin Abdurrahman	ACEH SELATAN	
6	B. Yusaini	ACEH BARAT	
7	Mukhlis	TAKENGON	Wilayah Linge
8	Sabri	BENER MERIAH	
9	Tony	MEUREUHMOM	
10	Abdurrahman (Do)	SABANG	
11	Abu Sanusi	PERLAK	
12	Effendi	ACEH RAYEUK	
13	Tengku Ni	ACEH UTARA	Wilayah Samudera Pasee
14	Tgk. Mukhtar Ben Hanafiah	LHOKSEUMAWE	Wilayah Kuta Pasee
15	Darwis Jeunieb	BIREUEN	Wilayah Batee Iliiek
16	Roni Ahmad	PIDIE	
17	Aiyub Syah	PIDIE JAYA	
18	Muslim	ACEH TAMIANG	

Berdasarkan nama panglima KPA yang ada diwilayah Aceh ini terdapat 18 KPA di Aceh dimana mereka juga sebelumnya merupakan panglima GAM ketika masa peperangan berlangsung di Aceh. Maka para panglima yang dulunya menjadi panglima perang namun ketika organisasi GAM in dilakukan tranformasi politik ke KPA para panglima tersebut juga masih mendapatkan posisi sebagai panglima didalam KPA yang ada diwilayah masing-masing.

Berdasarkan MOU Helsinki, GAM harus melakukan demobilisasi 3000 pasukannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2005 dimana GAM secara resmi membubarkan sayap militernya (Teuntara Nanggroe Aceh/TNA). Menurut Pemerintah, sekitar 1877 GAM yang menjadi tahanan atau narapidana akan diberikan amnesti. Dari sejumlah orang tersebut, 1.405 terdiri dari 1.219 narapidana dan 186 tahanan yang berada di Aceh. Berapa tepatnya jumlah tanahan GAM tidak pasti. Jika memegang klaim TNI, setahun setelah diberlakukannya darurat militer di Aceh yang telah menahan 2000 anggota GAM, maka hitungan

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

jumlah tahanan GAM jauh melebihi 1877 orang seperti pernyataan pemerintah melalui Hamid Awaludin. Tidak menutup kemungkinan apa yang dinyatakan TNI tersebut hanyalah kalim sebagai strategi untuk melumpuhkan semangat juang GAM. Hal ini diperlihatkan dengan tidak adanya data yang mendukung di lapangan bahwa para pejuang tersebut semuanya berada di dalam tahanan. Namun secara rinci jumlah mantan eks-kombatan GAM itu tidak diketahui secara pasti, namun bisa diprediksikan lebih dari pada jumlah yang disebutkan diatas.

Mereka merupakan tokoh yang berupaya menetralsir keadaan di Aceh agar tidak terjadi resistensi kembali oleh pihak-pihak yang tidak sepakat dengan perdamaian. Selain itu mereka juga berupaya mengadakan dialog-dialog perdamaian dengan tujuan membangun nuansa nasionalisme yang dipadukan dengan nilai ke-Acehan. Upaya ini tidak hanya bersifat lokal, namun juga nasional, yang mana para mantan pejuang kemerdekaan Aceh ini aktif mengikuti kegiatan-kegiatan konsolidasi perdamaian ditingkat nasional. Hal ini menandakan tidak ada lagi sentimen lokal dan nasional dalam tubuh mantan pejuang kemerdekaan Aceh dan semangat mereka dalam mempertahankan perdamaian.

Teungku Bakhtiar Abdullah dan Teungku Munawar Liza, merupakan beberapa tokoh mantan pejuang kemerdekaan Aceh yang aktif menyuarakan pentingnya konsolidasi perdamaian di Aceh. Tokoh-tokoh ini tidak dipertanyakan lagi perannya dalam mempertahankan perdamaian. Tanpa suara dari tokoh-tokoh ini maka mungkin bahwa perdamaian tidak akan terjadi di Aceh. Tanpa kerjasama yang baik antara semua pihak maka perdamaian yang sudah berlangsung di Aceh akan kembali terusik dan ini akan menajdi seperti kasus di Papua. Dimana dikarenakan para mantan eks-kombatan GAM ini menjadi aktor utama dibalk terjadinya perdamaian antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

Keamanan di Aceh mampu terus dijaga oleh kedua belah pihak yang pernah bertikai yaitu TNI dan Gerakan Aceh Merdeka. Letusan senjata dan kriminalitas mampu diredam hingga titik minimal, tanpa harus membesar-besarkan beberapa kasus kekerasan, penculikan, perampokan, dan penembakan serta masih banyaknya senjata ilegal yang masih beredar, namun nyatanya tingkat kriminalitas tersebut turun dengan cepat di tengah masyarakat setelah adanya perdamaian tersebut.

Perdamaian harus dipelihara serta dijaga agar tujuan setelah adanya perdamaian Aceh, konflik untuk memajukan dan memakmurkan masyarakat Aceh dapat tercapai dan terpenuhi, untuk menjaga perdamaian di Aceh tentu tidak bisa cuma dibebankan kepada KPA dan TNI yang pernah terlibat pertikaian konflik, namun untuk menjaga perdamaian di Aceh tersebut merupakan tugas kita bersama seluruh lapisan masyarakat Aceh dan pemerintah agar konflik tidak pernah terjadi lagi di Serambi Mekkah dimasa yang akan datang, seharusnya perdamaian yang telah berlangsung ini bisa terus dijaga oleh seluruh lapisan masyarakat Aceh.

Seharusnya Pemerintah Pusat belajar dari sejarah. Selain pemerintah secara legalitas harus mempertahankan hak otonomi khusus Aceh, secara substansi Pemerintah Pusat juga harus mengontrol dan bekerja sama dengan mantan pejuang kemerdekaan Aceh mengenai mempertahankan perdamaian. Jika hal ini tidak dilakukan, maka kemungkinan pemberontakan kembali dilakukan, sebagai akibat sikap ketidakpedulian Pemerintah Pusat terhadap perdamaian di Aceh. Jika dilihat dari susunan KPA itu sendiri tidak ada bedanya dengan susunan organisasi GAM dimana para penglima dimasa perperangan atau panglima GAM akan tetap mendapatkan posisi sebagai panglima didalam KPA meskipun hanya sebatas panglima muda wilayah, sehingga ini menjadi satu penyebab perdamaian ini abadi di Aceh. Penulis melakukan penelitian diwilayah Kuta Pasee dikarenakan dalam

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

satu kabupaten itu terbagi kedalam empat wilayah sehingga penulis memfokuskan penelitian di wilayah Kuta Pasee.

B. METODE KAJIAN

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Naturalsetting). Objek yang alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan setelah keluar dari objek relative tidak berubah (Sugiono, 2014). Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bertipe penelitiannya adalah deskriptif, maksudnya adalah mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan situasi dan kondisi yang sekarang terjadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tehnik wawancara dan penelitian ini menggunakan telaah kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan data dari literatur yang berhubungan dengan phenomena yang sedang dibahas, dan kemudian menganalisisnya. Literatur ini berupa buku, dokumen, jurnal dan situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Kasiram, 2008). Data didapat melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun narasumber yang diwawancarai diantaranya para petinggi GAM yang ada di wilayah Kuta Pasee adalah sebagai berikut : Panglima wilayah Kuta Pasee; Muktar Ben Hanafiah; Heriansyah Ben Indris; Saifuddin Ben Yunus dan Razali Ben Hasbi. Juga pengamat atau pakar politik: Dr. Zulham, BA., MA.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Terbentuknya Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada mulanya merupakan sebuah gerakan yang tumbuh di sekitar lokasi industri, tepatnya di bukit Chokan Pidie, yang di pelopori oleh seorang intelektual Aceh yang lama tinggal di Amerika Serikat, yaitu Muhammad Hasan Tiro. Pada tahun 1950-an Hasan Tiro pernah bekerja pada kantor perwakilan Indonesia di perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1954, beliau menggabungkan diri secara terang-terangan ke dalam Darul Islam atau disebut dengan DI/TII pimpinan Daud Beureueh. Beliau mengangkat dirinya sebagai duta besar DI/TII di PBB.

Sekitar tahun 1974-1975, Hasan Tiro berada di Pidie untuk mulai mensosialisasikan idenya dan sekaligus menggalang kekuatan untuk berdirinya Gerakan Aceh Merdeka dan pada tahun 1976 Hasan Tiro semakin memantapkan rencananya untuk membuat gerakan bagi kemerdekaan Aceh namun Hasan Tiro tidak lagi menempatkan ideologi Islam sebagai misi utama, akan tetapi beliau mengusung tema nasionalisme dan patriotisme Aceh. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Hasan Tiro segera menghubungi para ulama dan intelektual lainnya untuk mendukung rencananya. Karena keterbatasan beliau mensosialisasikan rencananya terhadap para ulama dan intelektual Aceh lainnya, menyebabkan hanya sedikit para ulama dan intelektual Aceh yang dapat di tarik untuk bergabung dengan GAM.

Pada tanggal 4 Desember 1976 tepatnya di bukit Chokan, pedalaman Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Hasan Tiro memproklamasikan kemerdekaan Aceh dari Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai hari lahir GAM. Munculnya GAM adalah akibat kebijakan pemerintah pusat dengan ABRI/TNI sebagai penopang utama yang di anggap tidak adil terhadap rakyat Aceh dan gerakan ini dapat di pandang sebagai representasi kekecewaan dan kemarahan rakyat Aceh terhadap Indonesia pada masa Orde Baru. Pada mulanya gerakan ini lebih di kenal

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

sebagai ASNLF (Aceh Sumatra National Liberation Front). Nama ini yang sering di gunakan dalam dokumen-dokumen resmi mereka, meskipun oleh TNI (pada waktu itu ABRI dan Pemerintah) mereka sering di sebut sebagai Gerakan Pengacau Liar (GPL) (Nurhasim,dkk.2003). Penggunaan nama ASNLF dan GAM ini, menurut keterangan dari Dr. Husaini Hasan tidak mengandung perbedaan, karena keduanya sama.

Dalam doktrin pendirian GAM memiliki ideologi kemerdekaan nasional, yaitu: bertujuan membebaskan kontrol politik asing dari pemerintahan Indonesia. GAM merupakan pemberontakan orang Aceh jilid ke-II yang memandang bahwa tergabungnya Aceh dalam NKRI merupakan tindakan illegal (Isra,ed. 2003). Sesungguhnya faktor yang melatar belakangi mereka bergerak adalah karena posisi mereka terancam, baik dalam sektor ekonomi maupun politik, sebagai akibat kebijakan yang sentralistik pemerintah Republik Indonesia. Faktor pemicu utama adalah kelahiran birokrat dari Jawa yang menyingkirkan elit Aceh (Susan, 2009)

Jumlah pengikut awal yang terlibat langsung dalam pemberontakan tersebut berjumlah kurang lebih dua ratus orang, yang mayoritas berasal dari Kabupaten Pidie tempat kelahiran Hasan Tiro. Sehingga tidak heran jika dalam keanggotaan GAM tersebut banyak terdapat hubungan keluarga. Setidaknya ada dua hal yang menjadi sebab bagi seseorang menjadi anggota atau membantu GAM, pertama adalah rasa kecewa terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada di Aceh. Kedua adalah karena tekanan-tekanan yang di berikan oleh para pemberontak (Syamsuddin, 1990).

Seiring dengan perjalanan waktu, GAM yang semula berbasis di Aceh Pidie kemudian meluas ke daerah Aceh Utara dan Aceh Timur dengan menggunakan pamflet-pamflet. Isi dari pamflet-pamflet tersebut adalah ringkasan Hasan Tiro tentang Aceh yang telah tersebar dalam bentuk buku ataupun buletin. Di kedua

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

daerah tersebut GAM menemukan momentumnya untuk melakukan sebuah gerakan terencana sejalan dengan munculnya berbagai ketimpangan sosial ekonomi terutama antara penduduk setempat dengan pendatang.

Selama GAM berdiri, telah berhasil merekrut banyak pemuda Aceh menjadi Anggota, bahkan GAM disinyalir telah mampu mempengaruhi gerakan mahasiswa. Selain itu GAM berhasil membentuk beberapa LSM yang turut mendukung pemisahan Aceh dari Indonesia, salah satunya adalah SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh) (Hadi, dkk, 2007). Perjuangan GAM sama halnya dengan SIRA, yang menanamkan visi kepada masyarakat agar setia dan berbagai lapisan sosial termotivasi berperan aktif dalam melakukan tindakan revolusioner.

Perjuangan mereka mengangkat aspek historis dari kesenjangan sosial, ekonomi, dan ketidakstabilan yang di gunakan untuk melegitimasi gerakan yang dilakukan, disamping menimbulkan efek psikologis pada masyarakat untuk memberi dukungan terhadap perjuangan mereka. Karena Aceh tidak dapatkan imbalan seperti apa yang mereka inginkan dari pemerintahan pusat, maka perpecahanpun tidak dapat di hindari. Ada tiga startegi GAM dalam membangun kekuatan organisasinya. Pertama, memanfaatkan sikap represif pemerintah terhadap situasi Aceh. Kedua, melalui pembangunan jalur internasional. Dan yang ketiga, memanfaatkan perasaan takut dan khawatir para investor lokal maupun asing yang berdiam di Aceh (Tippe, 2000).

Bila hanya dilihat dari sisi pribadi Hasan Tiro, maka akan di temukan bahwa beliau melancarkan GAM setidaknya oleh tiga hal: pertama, keinginan untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai seorang yang menyandang gelar Tiro untuk menoreh namanya dalam sejarah seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Kedua, karena ambisinya untuk menjadi pemimpin Aceh. Ketiga, karena rasa simpatinya melihat penderitaan rakyat Aceh. Selain karena alasan pribadi Hasan

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

Tiro ada sebagian pihak yang menyebutkan bahwa GAM periode pertama disebabkan oleh beberapa faktor berikut ini. Pertama, akibat penyelesaian masalah Darul Islam yang tidak tuntas. Kedua, akibat kekecewaan politik atas marginalisasi masyarakat Aceh dalam proses pembangunan di daerah industri minyak dan gas bumi di mana rakyat Aceh tidak di ikut sertakan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada mulanya persoalannya adalah masalahnya ekonomi serta politik, terutama perebutan sumber daya lokal. Namun, setelah itu baru persoalan digiring ke dalam masalah ideologi sehingga muncullah gerakan etnoregional dalam bentuk Gerakan Aceh Merdeka.

Jika di lihat yang terdapat dalam situs resminya tujuan GAM adalah untuk menjamin keberlangsungan Aceh sebagai sebuah bangsa, termasuk keberlangsungan dalam bidang politik, sosial, budaya dan warisan agama. Jika mengacu pada teks proklamasi Aceh Merdeka, baik berbahasa Inggris maupun berbahasa Aceh yang sudah di artikan ke dalam bahasa Indonesia yang berhasil di peroleh, cukup jelas menyatakan bahwa tujuan dari gerakan tersebut adalah untuk memerdekakan Aceh dari penjajahan bangsa Jawa. Merdeka disini mengandung dua makna, bagi para tokoh ulama GAM dan para pendukung aktif GAM, merdeka diartikan berdirinya Aceh sebagai sebuah negara yang terpisah dari pemerintah Indonesia. Sementara itu, bagi masyarakat desa yang menjadi pendukung GAM, bahwa bangsa Jawa di anggap sebagai penjajah karena di anggap telah mengambil hak mereka, baik hak ekonomi, politik, maupun sosial. Mereka ingin mengusir Jawa karena menganggap tidak di perlukan secara adil di tanahnya sendiri (Schulze, 2004).

2. Upaya Mantan Eks-Kombatan GAM dalam Menjaga Perdamaian di Aceh

Cara yang dilakukan oleh mantan eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam menjaga perdamaian ini menjada salah satu tujuan terpenting dalam

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

menjaga perdamaian di Aceh, karena bagaimana pun para mantan eks-kombatan GAM adalah aktor utama dibalik terjadinya perdamaian pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Dalam menjaga atau melakukan perdamaian GAM mempunyai komitmen untuk menjaga perdamaian yang sudah terjadi supaya perdamaian ini akan tetap abadi dan berjalan dengan baik dan bertahan untuk selamanya di Aceh. Wawancara dengan bapak Mahmudin Harun (Tuan Giok) anggota DPRK Kota Lhokseumawe periode 2019-2024.

“...tidak ada yang melanggar dengan MoU meskipun ada kerusuhan yang terjadi itu murni dibuat oleh tim yang kontra dengan Jakarta, namun dalam menjalankan MoU Self Governmen dan yang lainnya. Namun dalam hal pelanggaran MoU pihak Uni Eropa mengetahui itu semua.

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa GAM dalam menjaga perdamaian ini tidak ada istilah setengah-setengah namun meskipun ada kerusuhan yang terjadi dilapangan itu bukan murni dari pihak mantan eks kombatan GAM namun yang terjadi itu adalah yang dilakukan oleh tim yang hanya mengatas namakan GAM itu sendiri seakan GAM yang melakukan kerusuhan, padahal yang terjadi itu sepenuhnya adalah kejadian yang hanya atas nama individu atau organisasi yang kontra dengan Jakarta. Jika dilihat tidak ada yang melanggar dengan poin-poin MoU yang sudah menjadi kesepakatan damai antara pihak GAM dan dengan pihak pemerintah Indonesia. Wawancara dengan bapak Fauzi Yusuf (Sidom Peng) Wakil Bupati Aceh Utara periode 2017-2022.

“...makanya disini masyarakat harus memandang terlalu jauh jangan memandang instan seperti yang terjadi kemarin dalam pileg kalau masyarakat melihat secara instan ini tidak akan selesai memang pihak mantan eks-kombatan GAM dalam perdamaian tahun 2005 dalam perjalanan hampir 15 tahun, memang partai Aceh menang di parlemen dan di esekusiif diseluruh Aceh tetapi kan partai Aceh ini tidak menguasai kita bisa liha contoh Kosovo ini sampai pisah dari pemerintah itu karena dengan menguasai parlemen karena sudah terjun ke politik

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

setelah enam bulan diambil buku hijau perdamaian MoU Kosovo cuman perlu waktu enam bulan untuk merdeka tetapi Aceh hari ini sudah mau 15 tahun disinilah bahwa masyarakat harus melihat seberapa pentingnya menguasai parlemen."

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa masyarakat harus melihat jauh kedepan jangan hanya melihat untuk keperluan atau kepentingan sesaat namun yang diharapkan masyarakat melihat jauh kedepan jangan melihat secara instan. Pihak mantan eks-kombatan GAM berkomitemn menjaga perdamaian ini agar perdamaian ini abadi di Aceh, namun dalam hal menjaga perdamaian ini pihak GAM telah dibentuk KPA yang bertugas memantau seluruh para mantan eks-kombatan geriliya dulunya yang sering juga disebut dengan pihak mantan GAM atau eks-kombatan GAM. Namun sejarah telah membuktikan bahwa Kosovo yang sudah berhasil mewujudkan negara merdeka dimana yang diawali dari perdamaian yang juga dimediasi oleh CMI (Crisis Management Initiative) namun Kosovo berhasil sedangkan Aceh kenapa tidak berhasil. Disini juga ada masalah dimana dewan atau legislatif yang telah dipilih oleh masyarakat itu harus memperjuangkan kepentingan masyarakat jangan m,emperjuangkan kepentingan pribadi. Namun yang terjadi di Aceh malah sebaliknya sudah hampir 15 tahun perdamaian yang terjadi apapun itu tidak terjadi untuk Aceh dan tidak diperjuangkan secara nyata oleh legislatif Aceh. Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini Bin Hamzah selaku *panglima wilayah Samudra Pasee*.

"...kalau masala itu pihak mantan eks-kombatan GAM ragu untuk dibuktikan, karena untuk membuktikan pelaksanaan MoU Helsinki ini tidakdapat dibuktikan dulu karena pihak mantan eks-kombatan GAM ini masih meragukan, karena mengingat kepercayaan pemerintah tidak sepenuhnya atau tidak sesuai dengan yang telah tercantum dalam kesepakatan MoU Helsinki. Jadi wajar saja jika pihak eks-kombatan GAM ini meragukan terhadap pemerintah, tetapi apa bila pihak eks-kombatan GAM ini tidak memliki keraguan lagi jika pihak Indonesia melaksanakan

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

sesuai dengan kesepakatan damai dalam kontek perjanjian MoU. Selama ini kan masih banyak kejanggalan didalam pelaksanaan Mou Helsinki tertahan dan terjadi berbagai macam. Sudah 14 tahun perjanjian damai atau MoU Helsinki ini tidak terwujud sepenuhnya di Aceh.

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam hal menjaga perdamaian itu merupakan komitmen semua pihak terutama pihak mantan eks-kombatan GAM dikarenakan damai itu sudah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik. Walaupun yang terjadi hari ini hampir kekecewaan yang dialami oleh para pihak mantan eks-kombatan GAM atas perdamaian yang telah terjadi namun ini sudah kesepakatan walau bagaimana pun ini harus diperjuangkan untuk diwujudkan agar perdamaian ini sesuai dengan kesepakatan MoU Helsinki. Meskipun yang terjadi dilapanagn masih banyak kejanggalan yang terjadi dalam hal pelaksanaan kesepakatan MoU Helsinki dalam arti tidak bisa diwujudkan sepenuhnya meskipun Aceh sudah berdamain hampir 15 tahun. Dalam jangka waktu 15 tahun itu bukanlah waktu yang sedikit makanya disinilah pihak mantan eks-kombatan GAM melatakkkan kecurigaan kepada pihak pemerintah Indonesia. Wawancara dengan bapak Mukhtar Bin Hanafiah selaku ketua KPA wilayah Kuta Pasee Lhokseumawe.

"...perdamaian yang sudah terjadi ini menjadi komitmen semua anggota GAM yang ada di Aceh agar terjaga sampai mati dan abadi yang tidak bisa diganggu oleh kepentingan apaun didalam menjaga perdamaian di Aceh.

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa perdamaian yang sudah terjadi di Aceh tidak bisa diganggu-gugat dan sudah menjadi komitmen dalam menjaga perdamaian bagi semua pihak yang ada di Aceh terutama bagi pihak mantan eks-kombatan GAM yang ada diseluruh Aceh. Dalam menjaga perdamaian mantan eks-kombatan GAM berkomitmen supaya perdamaian ini akan terus abadi

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

di Aceh dan supaya tidak bisa terusik dan diusik oleh kepentingan apapun lagi yang ada di Aceh. Menjaga perdamaian di Aceh menjadi komitmen hidup atau matai para pihak mantan eks-kombatan GAM yang ada di Aceh. Wawancara dengan Tgk. Zulkarnaini Bin Hamzah selaku panglima wilayah Samudra Pasee.

“...perdamaian adalah kunci pembahasan dalam perdamaian ketika di Helsinki yang harus dijaga oleh semua pihak baik itu pihak GAM dan juga pihak pemerintah Indonesia karena perdamaian ini sudah disepakati di Helsinki dalam jangka waktu yang sudah lama dan ini harus kita jaga agar ini relevansi di Aceh dan agar ini bisa kita nikmati selamanya di Aceh.

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa perdamaian yang sudah terjalin di Aceh ini salah satu pokok pembahasan yang sudah terjadi semenjak lama antara pihak GAM dan pihak pemerintah Indonesia yang harus dijaga dan dirawat agar tetap abadi dan bertahan lama di Aceh, namunn perdamaian Aceh ini sudah menjadi komitmen bagi semua pihak terutama pihak GAM dalam menjaga perdamaian di Aceh. Perdamaian di Aceh ini terus dijaga dan sudah menjadi komitmen bagi pihak GAM agar perdamaian ini jaga disuik dan terus dijaga di Aceh..

Pembahasan :

1. KPA Untuk Menjaga Perdamaian di Aceh

Struktur ini tetap bertahan, walaupun mereka dipaksa meninggalkan jati diri mereka sebagai organisasi bersenjata menjadi kelompok sipil biasa, dan bergabung dalam Komite Peralihan Aceh (KPA), yang berdiri pada Desember 2005. KPA awalnya dimaksudkan untuk menangani kepentingan para bekas gerilyawan dan pendukung mereka. Penanganan itu sebaiknya dilaksanakan langsung oleh anggota KPA di Aceh, dan bukan melalui kontrol pimpinan GAM dari wilayah pengasingan. Hasilnya, para pimpinan lokal akhirnya memiliki kontrol atas berbagai gerakan

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

yang ditopang jaringan patronase; yang juga berarti, adanya dukungan suara di kemudian hari.

Secara organisasi, GAM tetap menaati ketentuan dalam MoU dengan menyusun ulang struktur organisasinya secara keseluruhan. Struktur yang baru dibentuk dengan menjauhi segala hal yang bertalian dengan gerakan militeristik, menjadi sebuah gerakan politik, yang mengikuti prinsip-prinsip anti kekerasan. Upaya yang dilakukan GAM setelah penandatanganan MoU, antara lain pembubaran divisi militer GAM, dan mengubahnya menjadi organisasi sipil, bernama Komite Peralihan Aceh (KPA), yang berfungsi di bawah payung Majelis Nasional GAM. KPA dirancang untuk mengintegrasikan para bekas pejuang GAM kembali ke kehidupan sipil. Sedangkan Majelis yang terdiri dari anggota senior GAM, dan bagian dari kelompok yang berbasis di Swedia itu bertujuan merumuskan strategi dan program politik GAM.

Struktur organisasi KPA terutama berdasarkan pada strukturstruktur militer, yang terlembaga selama fase akhir konflik dan menjadi sosok GAM di periode transisi. Tindakan ini merupakan langkah praktis dan taktis. Para panglima GAM lega karena ternyata kerangka organisasi mereka tak lenyap ketika perdamaian dimulai. Gerakan itu tetap terintegrasi dan program reintegrasi bisa lebih mudah dilakukan melalui satu organisasi. Para panglima GAM yang sebelumnya beroperasi di tingkat lokal kemudian ditunjuk sebagai kepala kantor KPA wilayah. Mereka bertugas mempertahankan struktur organisasi yang asli dari tingkat wilayah hingga unit terkecil di tingkat pedesaan.

Tugas KPA mencakup dari pemberdayaan ekonomi dan reintegrasi bekas pejuang hingga berfungsi pula sebagai basis bagi organisasi dan diskusi politik. Karena dibangun dari kerangka militer GAM, KPA mampu mempertahankan hubungan dekat dan kendali atas komandokomando GAM di tingkat bawah, yang

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

merupakan basis signifikan mobilisasi sebelum Pilkada 2006. Di mata para anggota GAM yang duduk di Majelis Nasional maupun para aktor internasional yang menangani DDR, KPA semula ditujukan sebagai organisasi masyarakat sipil daripada organisasi politik. Namun, kantor KPA di Banda Aceh menjadi pusat pertemuan para panglima ketika mereka mengunjungi Banda Aceh. Kantor itu juga menyediakan ruangan untuk menerima kunjungan donor dan pihak lainnya yang terlibat dengan KPA.

Pada saat yang sama, kantor KPA di Banda Aceh juga berfungsi sebagai ruang bagi aktivitas dan diskusi politik antara tokoh-tokoh penting gerakan. Menjelang Pilkada, KPA akhirnya menonjol sebagai suatu unit yang mengkoordinasi para bekas pimpinan militer dan anggota pasukannya, dan bukan diperuntukkan bagi para politisi. Selanjutnya, KPA menjaga gerakan agar tetap bersatu, sembari mempertahankan sistem patronase dan hubungan antara bekas pejuang di lapangan dengan para panglima wilayahnya.

Pasca MoU Helsinki mantan GAM di lapangan melakukan sejumlah metamorfosis sebuah perubahan dari sisi organisasi ideologi dan bentuk bentuk perubahan baju lainnya sebagai sarana bagi mereka untuk konsolidasi internal dan perjuangan atas sejumlah tuntutan mereka selama perundingan dengan pihak RI. Untuk memperjuangkan kepentingannya tersebut kelompok GAM di Aceh membentuk berbagai lembaga yang merupakan bentuk metamorfosis mereka.

Ada beberapa organisasi yang dibentuk oleh GAM pasca MoU Helsinki yang menggambarkan bentuk metamorfosis mereka. Pada sisi organisasi komando mereka mendirikan dua lembaga yaitu Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Majelis Nasional Majelis Nasional didirikan sebagai lembaga politik tertinggi dalam GAM yang menyatukan seluruh sumber daya ekonomi dan politik GAM sedangkan KPA dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan demobilisasi dan reintegrasi mantan

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

kombatan GAM di satu sisi dan di sisi lain untuk mengontrol agar kekuatan mantan kombatan GAM tidak liar.

Kedua lembaga tersebut awalnya dirancang oleh para aktivis GAM sebagai organisasi transisi setelah struktur TNA AGAM dan Pemerintahan Bayangan dibubarkan. Karena itu KPA misalnya disingkat peralihan yang mengandung dua makna proses peralihan diri GAM pada khususnya dan Aceh pada umumnya. Kedua lembaga tersebut memiliki peran dan fungsi yang kadang kadang relatif sama karena mereka saling melakukan koordinasi Majelis Nasional merupakan wadah bagi mantan non kombatan GAM kelompok sipil GAM sedangkan KPA dijadikan sebagai wadah bagi mantan kombatan GAM.

Dari kedua lembaga tersebut secara empirik KPA lebih berperan penting dalam menopang aktivitas bentuk bentuk peralihan kelompok GAM. Keberadaan KPA baik di level provinsi maupun kabupaten kota relatif signifikan secara politik dalam memperkuat posisi lembaga eksekutif KPA tak hanya menjadi sumber informasi penyaluran kader kader GAM tetapi juga berperan sebagai penyeimbang kekuatan riil politik lokal yang dalam banyak hal bisa disejajarkan dengan sistem komando teritorial koter yang dimiliki TNI. Hal ini tak mengherankan karena pengurus KPA adalah mantan kombatan GAM Struktur KPA tidaklah terlalu berbeda dengan struktur GAM pada saat melakukan pemberontakan karena wilayah kerja mereka tetap sama meliputi 17 wilayah di Aceh sebagai pembagian wilayah komando yang mereka anut Strukturnya relatif sama karena level provinsi diisi oleh mantan Panglima GAM atau elite GAM sementara di tingkat kabupaten dan kecamatan hingga gampong diisi oleh mereka mereka yang dulu menempati struktur GAM pada saat perang.

Kehadiran lembaga ini pada awalnya diharapkan dapat mempercepat proses transformasi politik dari kekuatan GAM yang ada. Namun proses untuk menjadikan

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

kekuatan bersenjata menjadi kekuatan sipil bukanlah sesuatu yang mudah. Agar kelompok ini berubah menjadi kekuatan sipil mereka diberi ruang untuk berpartisipasi secara politik ekonomi dan sosial. Konflik yang terjadi di Aceh yang merupakan salah satu provinsi yang ada di wilayah barat Indonesia ini sudah terjadi lebih dari 30 tahun. Banyak yang memprediksi bahwa konflik ini tidak dapat diselesaikan namun siapa tahu bahwa konflik ini berakhir di meja perundingan yang dilaksanakan oleh CMI. Dalam hal ini sebagai menjadi mediator dibalik terjadinya perdamaian di Aceh berhasil mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik akhirnya berdamai di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, yang menyebutkan bahwa perdamaian di Aceh semenjak tanggal 15 Agustus 2005 sampai seterusnya akan damai di Aceh.

Beberapa tahun kedepan ketika perdamaian ini sudah hampir berusia mencapai 16 tahun perdamaian ini ada kekhawatiran dari semua pihak dikarenakan nantinya perdamaian ini akan terusik seperti kasus yang terjadi di Papua yang baru-baru ini melanda Papua yang diungkit oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan ini juga dikhawatirkan akan terjadi di Aceh. Dalam hal menjaga perdamaian di Aceh para mantan eks-kombatan GAM yang menjadi aktor utama dibalik terjadinya perdamaian di Aceh ini memiliki komitmen penuh dalam menjaga perdamaian dikarenakan perdamaian ini sudah menjadi komitmen hidup atau mati perdamaian ini harus terus dijaga dan harus terus relevansi di Aceh.

Namun potensi konflik di Aceh di abad dewasa ini kecil kemungkinan dikarenakan posisi mantan pimpinan GAM ketika aktif didalam organisasi GAM dan setelah organisasi GAM dibubarkan menjadi KPA ini tetap mendapatkan posisi semua dan dalam bahasa lain posisi komando ini tidak diluncuti olah para petinggi GAM yang ada di Aceh sehingga kemungkinan untuk terjadinya konflik itu sangat kecil dan bahkan tidak akan terjadi. Jika dilihat konflik yang telah terjadi di Aceh itu

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

termasuk kedalam konflik yang mencari jalan keluar atau lebih tepatnya kedalam konflik produktif seperti yang telah dikemukakan oleh Novri Susan.

2. Eks Kombat GAM dan Upaya Menjaga Perdamaian di Aceh

Hambatan yang dialami oleh mantan eks-kombat GAM dalam menjaga perdamaian di Aceh ini lagi-lagi pada masalah dimana masyarakat secara umum sudah mulai tidak percaya lagi kepada mantan eks-kombat GAM dalam menjaga perdamaian dikarenakan setelah masyarakat memilih orang yang akan memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat dalam menjaga perdamaian. Hambatan yang dialami dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama sesama lembaga pemerintah tidak lagi kompak, ini masalah yang terjadi hari ini dimana lembaga legislatif dan eksekutif di Aceh sudah mulai tidak bekerjasama ini ditunjukkan bagaimana konflik yang terjadi diantara kedua lembaga pemerintah.

Jika dilihat dari kurnagnya kekompakan yang dialami oleh lembaga tinggi pemerintah yang ada di Aceh ini menjadi satu penyebab terhambatnya dalam hal menjaga perdamaian di Aceh. Namun jika dilihat menjaga perdamaian di Aceh ini tidak hanya menjadi tanggungjawab KPA semata namun juga ini menjadi tanggungjawan semua lembaga yakni legislatif, eksekutif dan juga KPA. Meskipun perdamaian ini sudah menjadi komitmen bagi seluruh para mantan eks-kombat GAM dalam menjaga perdamaian itu sendiri.

Kedua eksekutif harus mendukung apa yang dilaksanakan oleh KPA dalam hal menjaga perdamaian di Aceh, dikarenakan dukungan eksekutif ini menjadai penting dalam hal supaya lebih mempererat hubungan dalam hal menjaga perdamaian di Aceh. Eksekutif ini harus mendukung apa yang diusulkan oleh lembaga legislatif terutama mereka yang diutus oleh Partai Aceh dimana diantara mereka adalah berasal dari anggota KPA yang ada di Aceh dan apa yang diusulkan adalah sesuatu yang sangat berguna dalam menjaga perdamaian di Aceh. Namun

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

dewasa ini kejadian seperti ini yang dipertontonkan oleh lembaga eksekutif yang seakan-akan ego sektoral lebih tinggi dari mewujudkan kepentingan yang lebih luas. Ketiga masalah sesama sendiri yang terjadi hari ini mereka yang diutus oleh Partai Aceh untuk memperjuangkan kepentingan dalam menjaga perdamaian di Aceh sudah mulai tidak kompak sesama mereka yang dipilih oleh masyarakat untuk mewakili masyarakat yang menduduki kursi di parlemen atau di lembaga legislatif sudah banyak menimbulkan masalah sesama mereka sudah berbeda haluan dalam hal memikirkan kepentingan dalam menjaga perdamaian di Aceh.

D. SIMPULAN

Menjaga perdamaian adalah komitmen KPA, KPA adalah organisasi paramiltan kombatan GAM struktur KPA tidaklah terlalu berbeda dengan struktur GAM pada saat melakukan pemberontakan karena wilayah kerja mereka tetap sama meliputi 17 wilayah di Aceh sebagai pembagian wilayah komando yang mereka anut. Strukturnya relatif sama karena level provinsi diisi oleh mantan Panglima GAM atau elite GAM sementara di tingkat kabupaten dan kecamatan hingga gampong diisi oleh mereka mereka yang dulu menempati struktur GAM pada saat perang. Kehadiran lembaga ini pada awalnya diharapkan dapat mempercepat proses transformasi politik dari kekuatan GAM yang ada. Namun proses untuk menjadikan kekuatan bersenjata menjadi kekuatan sipil bukanlah sesuatu yang mudah. Agar kelompok ini berubah menjadi kekuatan sipil mereka diberi ruang untuk berpartisipasi secara politik ekonomi dan sosial.

Hambatan yang terdapat ketika KPA menjaga perdamaian adalah dimana kurangnya kerjasama antara sesama lembaga yang ada di Aceh. Eksekutif dan legislatif harus berjalan seiring tanpa melihat kepentingan pribadi yang harus

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

diperjuangkan adalah kepentingan bangsa Aceh. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat juga dapat menghambat KPA dalam membangun perdamaian di Aceh.

Daftar Pustaka

- BH, Liddell Hart. 1954. "*Strategy, rev. ed.*" New York: Frederick A. Praeger.
- David, P Barrash., dan Webel, Charles, P. 2001. *Peace and Conflict Studies*. California USA: Sage Publication. Dalam Novri , Susan. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Fisher, S, dkk. 2001. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama. Jakarta: The Council, Indonesia
- Hugh, Miall, dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras*. Edisi terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Johan, Galtung. 1996. *Peace by peaceful means: Peace and conflict, development and civilization*. London: SAGE Publications
- John, P Laderach. 1996. *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Culture*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.. Dalam Novri , Susan. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- M, Hamdan Basyar (ed). 2008. *Aceh Baru: Tantangan Perdamaian dan Reintegrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mohammad, Kasiram. 2008. *Metodelogi Penelitian, Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasa Metodelogi Penelitian*. Malang: UIN Press.
- Novri , Susan. 2009. *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana
- Olle, Tornquist (ed.). 2011. *Aceh: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*. Yogyakarta: PCD Press.
- Sugiono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.

UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

Skripsi

Fattaqun. 2017. *Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Naggroe Aceh Darussalam*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Nasruddin. 2014. *Pengaruh Konflik GAM-RI Terhadap Kehidupan Beragama, Sosial Dan Politik Rakyat Aceh (1976-2005)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Jurnal

Immanuel Kant. 1983. *Perpetual peace and other essays*. Hackett Publishing

Kawilarang dan Murizal Hamzah dalam Siti Ikramatoun & Khairul Amin. 2018. *Konstelasi Politik ACEH Pasca MoU HELSINKI (2006-2015)*. Volume 12, Nomor 1. USK.

Krepon, *The stability-instability paradox, misperception, and escalation control in south Asia*.

Paul K Huth. 1988. "Extended deterrence and the outbreak of war." *American Political Science Review* 82.2

S. Paul Kapur. 2005. "India and Pakistan's Unstable Peace: Why Nuclear South Asia Is Not Like Cold War . Europe." *International Security* 30.2

Sebastian Rosato. 2003. "The flawed logic of democratic peace theory." *American political science review* 97.4

Sumit Ganguly. 1995. "Indo Pakistani Nuclear issues and the stability/instability paradox." *Studies in Conflict & Terrorism* 18.4

Media Online dan Dokumen

[http://aceh.tribunnews.com/2018/10/12/pemerintah-harus-memahami-peran-penting-mantan kombatan-gam-dalam-menjaga-perdamaian-aceh?page=all](http://aceh.tribunnews.com/2018/10/12/pemerintah-harus-memahami-peran-penting-mantan-kombatan-gam-dalam-menjaga-perdamaian-aceh?page=all), diakses pada tanggal 8 February 2019.

**UPAYA EKS-KOMBATAN GERAKAN ACEH MERDEKA (GAM) DALAM
MENJAGA PERDAMAIAN DI ACEH**

JPP Volume 7 | Nomor 1 | 50 - 73 | Januari – Juni 2022

Aceh Monitoring Mission (AMM) merupakan delegasi dari Uni Eropa untuk memantau perdamaian Aceh.